UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Difusi dan Adopsi Inovasi Kebijakan Layanan Lansia Terintegrasi Berbasis Komunitas di kota Yogyakarta
Mughny Ibtisyam Mukhlis, Hakimul Ikhwan, S.Sos., MA., Ph.D; Dr. Novi Widyaningrum, S.IP., MA
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Kota Yogyakarta menghadapi penuaan penduduk dengan persentase lansia mencapai 16,13% pada tahun 2025, jauh melampaui angka nasional. Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) dikembangkan sebagai inovasi kebijakan untuk menjangkau lansia dengan ketergantungan tinggi melalui manajemen kasus berbasis komunitas di tingkat kelurahan. Penyebaran LLT dari kelurahan percontohan ke lima kelurahan lain menghasilkan tingkat adopsi dan perkembangan yang berbeda-beda, padahal seluruh kelurahan difasilitasi oleh aktor yang sama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme difusi dan adopsi inovasi kebijakan LLT serta menjelaskan bagaimana inovasi tersebut berlangsung di Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus pada lima kelurahan pelaksana LLT, yakni Gedongkiwo, Purbayan, Baciro, Kotabaru, dan Semaki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan dari unsur organisasi perangkat daerah, pengurus LLT kelurahan, dan perangkat kelurahan, dilengkapi dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan kerangka difusi inovasi Rogers (2003).

Hasil penelitian memperlihatkan difusi LLT berlangsung sebagai proses bertahap yang tidak digerakkan oleh mandat formal semata. Penetapan melalui Surat Keputusan Walikota diikuti dua fase stagnasi, dan difusi baru bergerak aktif setelah legitimasi formal, kapasitas teknis, dan pemantik eksternal tersedia secara berurutan. Penyebaran informasi berlangsung hampir sepenuhnya melalui komunikasi antarpribadi, sedangkan penerimaan inovasi ditopang oleh pemanfaatan struktur sosial yang telah mapan serta norma penghormatan kepada lansia, kerelawanan, dan nilai religius. Proses adopsi tidak sepenuhnya mengikuti urutan linear model Rogers, ditandai peleburan tahap persuasi dan keputusan menjadi satu momen penerimaan, *re-invention* pada tahap implementasi, serta konfirmasi yang terwujud lewat inovasi tambahan hasil inisiatif pengurus kelurahan. Perbedaan perkembangan antar kelurahan tidak terjelaskan oleh urutan penetapan, urutan pendampingan, maupun jumlah lansia, tetapi oleh arah inisiasi pelaksanaan dan susunan pengurus di tingkat kelurahan. Sebagai inovasi, LLT teridentifikasi sebagai inovasi kebijakan sosial berbasis komunitas berkarakter koordinatif yang kebaruannya bersifat integratif pada proses dan metode pelayanan, terlihat melalui integrasi lintas sektor di bawah arahan Bappeda, metode manajemen kasus, pelaksanaan di ranah komunitas, kepemimpinan dua simpul, dan mobilisasi sumber daya informal dari jejaring lokal.

Kata kunci: difusi inovasi, adopsi inovasi, inovasi kebijakan sosial, Layanan Lansia Terintegrasi, lanjut usia

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Difusi dan Adopsi Inovasi Kebijakan Layanan Lansia Terintegrasi Berbasis Komunitas di kota Yogyakarta
Mughny Ibtisyam Mukhlis, Hakimul Ikhwan, S.Sos., MA., Ph.D; Dr. Novi Widyaningrum, S.IP., MA
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Yogyakarta City faces population ageing, with older persons accounting for 16.13% of its population in 2025, far above the national figure. The Integrated Elderly Service (*Layanan Lansia Terintegrasi*, LLT) was developed as a policy innovation to reach highly dependent older persons through community-based case management at the kelurahan level. The spread of LLT from the pilot kelurahan to five other kelurahan produced uneven levels of adoption and development, even though all were facilitated by the same actor. This study analyses the mechanism of diffusion and adoption of the LLT policy innovation and explains how the innovation operates in Yogyakarta City.

A qualitative approach with a case study strategy was applied across the five implementing kelurahan: Gedongkiwo, Purbayan, Baciro, Kotabaru, and Semaki. Data were collected through in-depth interviews with 17 informants drawn from regional government agencies, kelurahan-level LLT management, and kelurahan officials, supplemented by policy documentation, and analysed using Rogers' (2003) diffusion of innovations framework.

The findings show that the diffusion of LLT unfolded as a gradual process not driven by formal mandate alone. Its establishment through a Mayoral Decree was followed by two phases of stagnation, and diffusion only gained momentum once formal legitimacy, technical capacity, and an external trigger became available in sequence. Information spread almost entirely through interpersonal communication, while acceptance of the innovation rested on the use of established social structures together with norms of respect for older persons, voluntarism, and religious values. The adoption process did not fully follow the linear sequence of Rogers' model: the persuasion and decision stages merged into a single moment of acceptance, the implementation stage was marked by re-invention, and confirmation took the form of additional innovations initiated by kelurahan managers themselves. Differences in development across kelurahan were explained neither by the order of designation, the order of mentoring, nor the number of older residents, but by the direction from which implementation was initiated and the composition of the management team formed at the kelurahan level. As an innovation, LLT is identified as a community-based social policy innovation of a coordinative character, whose novelty is integrative in service processes and methods, evident in cross-sectoral integration directed by Bappeda, the case management method, delivery within the community sphere, dual-node leadership, and the mobilisation of informal resources from local networks.

Keywords: diffusion of innovations, innovation adoption, social policy innovation, Integrated Elderly Service, older persons